

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan rakyat untuk turut serta dalam pengambilan setiap keputusan, termasuk juga dalam pemilihan pemimpin. Dengan sistem demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat tersebut, maka pemilihan umum menjadi barang wajib untuk diikuti. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1 bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2019 masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta anggota legislatif (Pileg). Berbeda dengan Pemilu yang sebelum-sebelumnya pada tahun 2014, 2009, dan 2004 yang dilaksanakan 2 kali, yakni Pileg terlebih dahulu baru kemudian Pilpres, pada tahun 2019 Pemilu dilaksanakan secara serentak, yaitu Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak. Ketika pemilih masuk ke TPS maka akan mendapatkan 5 surat suara sekaligus untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD dan pasangan calon pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Perbedaan Pemilu 2019 dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya bukan hanya terletak pada penyelenggaraannya yang dilaksanakan secara serentak, yaitu

Pilpres dan Pileg, namun juga dalam tataran kondisi politik dan masyarakat Indonesia. Keketatan diantara pendukung kedua pasangan calon menyebabkan pemilihan presiden tahun 2019 mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya. Pilpres kali ini merupakan *rematch* atau tanding ulang dalam persaingan 4 tahun yang lalu di tahun 2014. Inilah yang menyebabkan masyarakat jenuh yang disebabkan juga masalah kepastian sosial politik (*social political certainty*) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoaks yang muncul tanpa henti.

Dalam hal politisasi agama, Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Kedua paslon saling berebut ulama untuk memberikan rekomendasi pasangan calon yang akan maju ke dalam kontestasi Pilpres 2019. Isu agama tersebut kemudian melahirkan ijtima' ulama yang merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis agamis). Dua tokoh seperti Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf al-Jufri dan ulama kondang, Ustad Abdul Somad muncul dalam bursa cawapres Prabowo. Menariknya, hasil ijtima' tersebut tidak diakui oleh ulama-ulama lainnya. Misalnya NU tidak merasa dilibatkan dalam ijtima' ulama tersebut. Lalu muncul deklarasi kurang lebih 400 kiai dan pengurus pesantren seluruh Indonesia menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dari fenomena ini dalam Pemilu 2019 dapat dikatakan bahwa partai politik

semakin gagal menjalankan fungsinya sebagai kaderisasi politik. Parpol lebih mengandalkan ketokohan ketua umum, dewan penasehat, bahkan ulama.

Dengan adanya Pemilu yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019 memunculkan tantangan baru bagi penyelenggara Pemilu bahwa rakyat harus benar-benar menyalurkan hak pilihnya untuk memilih nahkoda negara selama 5 tahun ke depan (2019-2024). Salah satu tantangannya adalah iklim politik di tahun 2019 yang akan semakin memanas.

Ketika iklim politik sudah memanas, apalagi ditambah dengan perkembangan penyebaran informasi melalui media sosial dan sangat berpotensi untuk menyebarkan informasi yang bohong (hoaks). Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Ismail Cawidu menegaskan, hoaks yang dominan adalah terkait isu sosial politik yang jumlahnya sekitar 91,8 persen. Berdasarkan data survei dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), didapati alasan maraknya penyebaran hoaks paling tinggi ialah karena informasi palsu itu, bisa jadi alat pengaruh opini publik. Hal lain karena masyarakat senang dengan berita heboh dan tidak adanya tindakan hukum. Menurut data Mastel pada Februari 2017 itu, hoaks juga dapat dimanfaatkan sebagai bisnis. Hal ini ditakutkan karena iklim politik yang semakin memanas, saling mencari kesalahan, bahkan saling melempar fitnah melalui informasi hoaks tersebut maka akan memunculkan kejenuhan di tengah-tengah masyarakat.

Masih melekat dalam ingatan kita munculnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden fiktif, Nurhadi-Aldo (Dildo) di media sosial. Munculnya pasangan fiktif tersebut seolah menjadi sinyal kejenuhan sebagian masyarakat

terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Ekspresi ini tidak muncul pada 2014 ketika pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla muncul sebagai calon presiden dan calon wakil presiden saat itu.

Mengingat suara pemilih muda (17-35 tahun) pada Pemilu 2019 mencapai 40% dari jumlah pemilih yang ada. Dampak terburuk dari fenomena pasangan fiktif ini adalah pemilih muda tersebut akan lebih memilih untuk golput¹. Pada Pilpres tahun 2009 jumlah pemilih yang tak menggunakan suaranya berjumlah 28,3 persen, dan pada saat Pilpres 2014, angka golput mencapai titik tertinggi yakni 30 persen lebih dari jumlah pemilih. Dikhawatirkan jumlah ini akan terus naik dengan semakin meningkatnya kejenuhan masyarakat yang ditandai dengan munculnya fenomena pasangan fiktif tersebut. Namun ternyata, jumlah partisipasi politik pada Pemilu 2019, khususnya Pilpres meningkat tajam. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebutkan, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Jika dibandingkan 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen. "Ada peningkatan, partisipasi masyarakat di (Pemilu) 2019 ini 81 persen, meningkat dari Pilpres 2014 yang 70 persen, Pileg 2014 yang 75 persen," kata Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019). Angka 81 persen itu, kata Viryan, bahkan melampaui target nasional soal partisipasi pemilih yang mematok angka 77,5 persen.

¹ Fenomena pasangan fiktif tersebut tidak bisa kita anggap remeh. Pasalnya hal seperti ini terjadi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, terutama generasi muda terhadap calon yang hanya mengumbar janji-janji manis belaka dan juga bentuk kejenuhan polarisasi politik yang itu-itu saja.

Negara yang menggunakan sistem demokrasi memberikan kebebasan yang lebih kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mereka secara mandiri dapat menentukan pendapat dan keputusan untuk keberlangsungan negara dan bangsa. Begitu juga dengan di Indonesia. Demokrasi memungkinkan perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat diluar organisasi pemerintah yang secara mandiri berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk partisipasi politik. Semakin banyak aktor dan faktor yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Namun, dalam konteks Pemilu di Indonesia lembaga khusus dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut dipegang oleh KPU. KPU memegang peranan strategis dan harus terus berbenah untuk menghadapi situasi yang dinamis demi menciptakan Pemilu yang profesional. KPU harus siap dengan segala perkembangan dalam masyarakat, apalagi dengan meningkatnya pemilih pemula dan ditambah dengan bumbu politik identitas yang semakin menguat. Ini menarik karena selama ini kedua hal tersebut (politik identitas dan peningkatan pemilih muda milenial) tidak dilihat sebagai fenomena yang saling terkait.

Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Sekali Kayuh Dua Pulau Terlampaui: KPU Dalam Melewati Turbulansi Politik Identitas dan Lonjakan Pemilih Muda Milenial”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa terjadi peningkatan partisipasi politik secara tajam pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana KPU dalam melewati memanasnya politik identitas dan meningkatnya pemilih muda milenial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan penyebab peningkatan tajam partisipasi politik pada Pemilu 2019
2. Untuk menjelaskan keberadaan KPU dalam melewati memanasnya politik identitas dan meningkatnya pemilih muda milenial

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Sekali Kayuh Dua Pulau Terlampaui: KPU Dalam Melewati Turbulansi Politik Identitas dan Lonjakan Pemilih Muda Milenial juga memiliki manfaat baik secara akademis dan juga manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai khasanah ilmu pengetahuan untuk memperluas ilmu manajemen strategi ataupun yang berkaitan dengan masalah lain. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk menggali kreatifitas dalam mencari ide-ide.

Serta mahasiswa harus mampu melahirkan inovasi sekaligus menjawab tantangan politik nasional dan mewujudkannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai manajemen strategi meningkatkan kesadaran masyarakat pada saat tahun-tahun demokrasi. Bagi penyelenggara Pemilu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi sehingga tetap sebagai benteng demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Selain itu, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pemilih muda untuk tidak acuh tak acuh terhadap politik (pendidikan politik).

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Demokrasi

Menurut Paul Broker, definisi tentang demokrasi memiliki banyak terminologi, antara lain menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, pluralisme sosial dan politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain².

Menurut Juan dan Alfred, demokrasi didefinisikan sebagai persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintahan. Pada gilirannya demokrasi menuntut dilaksanakannya Pemilu yang bebas dan bersifat kompetitif, yang hasilnya dapat menentukan orang-orang yang memerintah³

Menurut Maswadi Rauf ada 2 konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi, yaitu kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Kedua konsep inilah yang akan menjadi pondasi dalam membangun demokrasi. Dengan adanya demokrasi maka rakyat memiliki ruang untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap kinerja aparatur negara, serta memberikan saran dan masukan terkait berjalannya pemerintahan. Oleh karena demokrasi memberikan kedaulatan kepada rakyat, dibandingkan dengan sistem politik yang tidak demokratis, sistem demokrasi

² Muslim Mufti, Teori-Teori Demokrasi, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm 21

³ Muslim Mufti, Teori-Teori Demokrasi, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm 24

dianggap lebih unggul. Robert A. Dahl mengemukakan 10 keunggulan demokrasi, sebagai berikut :

- a. Demokrasi menolong untuk mencegah tumbuhnya pemerintahan yang kaum otokrat yang kejam dan licik
- b. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang tidak demokratis
- c. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternative lain yang memungkinkan
- d. Demokrasi membantu rakyat dalam melindungi kepentingan dasarnya
- e. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri
- f. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam menjalankan tanggung jawab moral
- g. Demokrasi membantu perkembangan umat manusia secara lebih, dibandingkan alternatif lainnya yang memungkinkan
- h. Membantu tingkat persamaan politik yang relatif tinggi
- i. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berpegang satu sama lain
- j. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis⁴.

⁴ Muslim Mufti, Teori-Teori Demokrasi, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm 29

Masyarakat yang hidup dalam negara yang demokratis patut memanfaatkan kedaulatannya sebagai warga negara untuk bersama-sama menentukan arah kemajuan negara. Menurut Djuanda Wijaya kehidupan demokratis dalam suatu negara ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dinikmati dan dilaksanakannya hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka
- b. Penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (*supremacy of law*), kesamaan didepan hukum (*equality before the law*), dan jaminan terhadap HAM
- c. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat
- d. Kebebasan pers dan pers yang bertanggungjawab
- e. Pengakuan terhadap hak minoritas
- f. Pembuatan kebijakan negara berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan
- g. Sistem kerja yang koopertif dan kolaboratif
- h. Keseimbangan dan keharmonisan
- i. Tentara yang professional sebagai kekuatan pertahanan
- j. Lembaga peradilan yang independen

Kemudian dalam demokrasi terdapat standar-standar yang harus di penuhi, diantaranya,

1. Akuntabilitas dan Responsibilitas

Lincoln menangkap standar untuk menilai demokrasi ketika dia berbicara tentang pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Cirinya adalah bersandar pada kontrol tidak hanya pada pembuat kebijakan tetapi juga warga negara yang dianggap setara secara politik, Pemilu memegang peranan penting, serta keputusan ditentukan oleh mayoritas. Peran publik dalam memastikan akuntabilitas ini tidak kecil.

2. Komunikasi Politik

Pengertian sederhana dari komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem politik kepada bagian sistem politik yang lain, dan antara sistem politik dengan sistem-sistem yang lain. Dalam realitasnya, komunikasi politik berkaitan dengan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.

3. *Stability & Balance*

Keseimbangan diperlukan antara tindakan publik yang akan memastikan akuntabilitas dan lintas kebutuhan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial demi kepuasan publik. *“If public inattentiveness permits the system to be harmonious, the threat of the citizens becoming active forces the leader to respect public opinion”*. Dapat diartikan bahwa, Jika ketidakpedulian publik membuat sistem menjadi harmonis, ancaman warga negara menjadi aktif memaksa pemimpin untuk menghormati opini publik. Justru dengan pernyataan ini tuntutan publik akan semakin luas.

4. *Sense of Community and Consensus* (Rasa Komunitas dan Konsensus)

Sikap ini menyatukan rasa kebersamaan, termasuk rasa percaya pada para pemimpin/pemerintah. Keyakinan lain yang diterima sangat penting bagi negara demokrasi yang sedang berkembang, seperti penerimaan publik atas hak minoritas dan kesediaan untuk menerima hasil yang dibuat oleh prosedur yang diterima, bahkan ketika hasil itu secara pribadi tidak menyenangkan.

Meskipun prinsip komunitas tidak selalu diterapkan pada masalah akuntabilitas, nilai-nilai bersama dapat menyediakan kesesuaian anatar opini dan kebijakan melalui dua model tambahan hubungan politik. Kedua model tersebut adalah *The Sharing Model* dan *The Role Playing Model*. *The Sharing Model* atau Model Berbagi adalah model yang hanya menyatakan bahwa karena mayoritas sikap dari masyarakat, para pemimpin tidak bisa tidak memuaskan opini publik. Sedangkan, *The Role Playing Model* atau Model Bermain Peran bergantung pada para pemimpin dalam pemerintahan yang berbagi dengan publik dan yakin bahwa perwakilan harus mendukung publik.

1.5.1.2 Penerapan Demokrasi Indonesia

Demokrasi dalam bangsa Indonesia pada arah implementasi sistem politik telah banyak memahami varian-varian demokrasi di dunia. Beberapa di antaranya bahkan telah diujicobakan di negeri ini: demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila. Namun berbagai varian demokrasi ini gagal memberikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi dalam arti yang sebenar-benarnya. Berikut penerapan demokrasi di Indonesia dalam beberapa masa.

1. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama terjadi proses pemindahan kekuasaan Belanda ke tangan Indonesia, namun dalam tatanan demokrasi belum membawa pengaruh yang berarti. Fokus yang terbawa tidak terpapar secara substantif melainkan simbolik semata. Pembangunan semesta yang dicanangkan Presiden Soekarno untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional yang bercorak lebih sosialis terbukti gagal total, akibat tidak adanya dukungan struktur politik yang mapan dan demokratis. Kelas menengah yang diharapkan akan lahir pun sulit diketemukan.

Kegagalan praktek pementrian demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi ala Barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Nampaknya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala Barat tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada ideologi-kultural dan keroposnya sistem ekonomi saat itu.

Maka kemudian, Soekarno mencoba sistem Demokrasi Terpimpin, yang katanya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno. Bung Karno selaku Presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-

lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965.

2. Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik.

Stabilitas pembangunan ekonomi lantas diidentikkan dengan stabilitas nasional. Perlahan-lahan konsep stabilitas nasional diperluas menjadi logika anti-kritik dan anti konsep. Sebagai logika anti-kritik, stabilitas nasional dikaitkan dengan masalah-masalah *security* dan banyak berfungsi untuk membantu penyelenggaraan mekanisme kekuasaan negara. Sebagai logika anti konsep, stabilitas nasional dikaitkan dengan masalah legitimasi dan banyak berfungsi untuk mendukung seni mengelola otoritas kekuasaan negara (Geertz, 1980). Yang terjadi kemudian adalah sentralisasi peran negara yang dipersonifikasikan lewat Soeharto, MPR, DPR, Pers, Partai Politik, Ormas dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan yang "dipasung" secara sistematis di bawah kendali negara oleh Soeharto. Yang lahir dalam situasi seperti itu adalah demokrasi semu, "demokrasi jadi-jadian". Paradoks demokrasi ini pada akhirnya juga runtuh pada tanggal 21 Mei 1998.

Demokrasi saat orde lama dan orde baru memiliki perbedaan (Nihaya M : 2011) M Pertama, Kehidupan demokrasi di era Orde Lama sebenarnya tidak dibelenggu, tetapi diberi kebebasan seluasnya, sehingga tidak dapat dikendalikan. Akibatnya terjadi konflik ideologis yang mengganggu kinerja pemerintahan. Kedua, Kehidupan demokrasi di era Orde Baru dipersempit ruang geraknya sehingga terjadi proses demokrasi yang sifatnya semu. Hal ini memperkuat posisi pemerintah di bawah dominasi militer. Stabilitas terasa terjamin, pembangunan berjalan dengan baik, tetapi demokrasi dan pemenuhan HAM mengalami degradasi. Hal ini akhirnya dibayar mahal dengan gerakan reformasi yang menuntut perubahan, seiring dengan terjadinya krisis multidimensi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam stabilitas, dan menghancurkan kehidupan ekonomi rakyat.

3. Era Reformasi

Pada masa reformasi, Aspinall (2004) mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan munculnya banyak partai baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya.

Namun, di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-

benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, namun di sana sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai.

Berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi sering membuat kita untuk berpikir ulang dan mengedepankan pertanyaan kritis: Apakah masa transisi ini akan bisa dilewati dengan baik sehingga terbentuk *consolidated democracy*, atau kita gagal melaluinya sehingga yang muncul adalah *consolidated anarchy* yang dapat menggiring kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik?

Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi ini menunjukkan, betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih dan bertanggung jawab, baik pada tingkat alam pikiran maupun lebih-lebih sebagai politik yang tersistem. Perjuangan demokrasi akhirnya harus berhadapan dengan godaan-godaan kekuasaan di tengah sejumlah jerat politik yang sebenarnya adalah anti demokrasi.

Demokrasi di Indonesia diimplementasikan dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Meski Pemilu bukan satu-satunya tolok ukur dalam tatanan negara demokrasi namun ajang ini mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh pihak yang turut andil dalam Pemilu memiliki beragam cara

maupun strategi untuk menyukkseskannya. Berbagai hal melatarbelakangi kedua hal tersebut. Tak terkecuali juga para elit politik yang ingin mempertahankan kekuasaan oligarki mereka dengan mengikuti proses demokrasi ini.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sangat bergantung pengetahuan, pendidikan dan penerimaan masyarakat terhadap informasi yang benar sehingga bisa membuat pilihan yang rasional dalam proses politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat (Golose: 2019). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergolong masih rendah menjadikan demokrasi yang nampak dari Indonesia menganut paham demokrasi secara *real* tanpa adanya wawasan bahwa pemertahanan kekuasaan politis secara tidak langsung juga diwarnai dengan kekuasaan paham-paham lain.

Teori Pzeworski yang diambil setelah melakukan penelitian di Brasil pada tahun 1982, di mana elit mempergunakan instrumen demokrasi untuk mengamankan pemilihan presiden, merupakan teori yang banyak berlaku di negara berkembang, tidak terkecuali negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Biasanya, mereka menganut teori bahwa demokratisasi dilakukan melalui “modernisasi”, termasuk di antaranya pengembangan lembaga-lembaga politik demokrasi – *institution's building* (Rendy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D demokrasi negara berkembang).

Buehler (2014) menyatakan bahwa politik lokal di Indonesia tidak dihasilkan oleh oligarki melainkan oleh elit-elit negara yang telah menyesuaikan diri dengan watak perubahan politik pasca orde baru. Kemudian Liddle (2013) menyebutkan bahwa basis kewenangan kekuasaan personal yang ada di Indonesia

telah bertransformasi secara fundamental menjadi kekuasaan legal-konstitusional yang otonomo. Tihami (1992) menyebutkan bahwa kelestarian kepemimpinan di wilayah Indonesia salah satunya Banten merupakan hasil dari perilaku kiai dan jawara dalam sistem sosial yang mempunyai hubungan *sibernetik* dengan agama dan magis dalam sistem budaya. Berbagai pendapat tersebut memaparkan bahwa terdapat berbagai paham yang melandasi kelanggengan kekuasaan dibalik paham demokrasi.

Pencapaian kekuasaan yang ada di Indonesia salah satunya melalui kemenangan dalam Pemilu. Meski terdapat Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) nyatanya berbagai hal turut terjadi dalam proses keberlangsungan Pemilu. Banwaslu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya. Beberapa hal diantaranya minimnya pengetahuan atas pentingnya pengawasan publik, jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, keterbukaan informasi tentang kePemiluan, pendanaan, inovasi teknologi informasi dalam pengawasan, dan intimidasi (Simanjuntak: 2017).

Sangat disayangkan jika di balik proses demokrasi terdapat pihak-pihak yang sengaja menyebarkan kebohongan dan informasi yang salah kepada publik demi kepentingan politis. Mengajukan pembenaran-pembenaran palsu dan mengingkari kebenaran untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Penyebaran berita bohong (hoaks) hingga penerapan strategi propaganda melalui penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis atau yang dikenal sebagai *firehose of falsehood* (Petrus Reinhard Golose:2019). *Firehose of falsehood* berevolusi di sejumlah pemilihan umum, semisal di Amerika Serikat (AS), Brasil, dan

referendum Brexit. Di ajang Pilpres AS 2016 yang mempertemukan Donald Trump dan Clinton, strategi semburan fitnah mencapai puncaknya. Hal ini terjadi lewat pelibatan konsultan politik Roger Stone yang jago menebar kampanye negatif yang sangat ofensif melalui 3 taktik: serang, serang, serang. Stone merupakan salah satu penasehat senior Trump. *Firehose of falsehood* atau strategi semburan fitnah ini juga terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2019 yang menyebabkan turbulensi politik identitas semakin memanas dan menyebabkan polarisasi yang kuat di masyarakat.

Pada tahun 2018 paling tidak terdapat 3884 kasus hoaks dan hate speech yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, jumlah kasus terus meningkat dari jumlah kasus tahun 2017 yang mencapai 1254 kasus. Hoaks dan hate speech ini dibuat dan disebarluaskan oleh akun-akun asli maupun akun anonymous. Materi dari hoaks yang disebarkan dapat berupa *black campaign* untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon. Mengingat salah satu kontestan Pemilu 2019 merupakan calon petahana, hoaks yang disebarkan juga dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah secara umum. Bahkan pada Oktober 2018 lalu, Jokowi memang sempat mengungkapkan masih ada 9 juta orang percaya dirinya kader PKI sebagaimana diulas dalam Obor Rakyat pada 2014. Angka itu, kata Jokowi, diketahui dari survei internal yang digelar TKN Jokowi-Ma'ruf. Strategi-strategi seperti inilah yang dapat merusak demokrasi.

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada

hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya (Heru Nugroho : 2012). Hal ini berarti walaupun dalam demokrasi mengagungkan nilai kebebasan, bukan berarti dalam melaksanakan praktek demokrasi dilakukan dengan semena-mena. Arbit Sanit dalam Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia pada 2015 menyatakan bahwa benih konflik terpendam, yang rentan terpicu oleh ketegangan dalam perjuangan hak kelompok atau golongan, bisa tampil dari tatanan masyarakat majemuk dan kelas sosial yang berjarak dan senjang, untuk merebak menjadi konflik intra dan antar partai, dan memuncak menjadi konflik kelembagaan negara.

Kedewasaan demokrasi Indonesia terus diuji. Belum hilang dari ingatan kita saat menguatnya politik identitas pada Pilkada DKI 2017 yang menggunakan isu agama sangat kuat, sehingga terjadi polarisasi di masyarakat. Pengaruh ini akan cukup kuat terutama pada basis-basis massa religius fundamental. Turbulensi politik identitas pada Pilkada DKI 2017 terbawa hingga Pemilu 2019, khususnya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Hal ini diperkuat data dari Bawaslu yang merilis tentang identifikasi potensi kerawanan Pemilu 2019 salah satunya adalah penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam materi kampanye. Persaingan antarkandidat dapat memicu penggunaan isu SARA dalam aktivitas sosialisasi diri kepada pemilih. Hal ini mesti menjadi perhatian, karena isu kedekatan identitas atas dasar suku dan agama akan dianggap

relatif mudah digunakan untuk menarik simpati pemilih ketimbang pendekatan visi dan program.

Apalagi Pilpres 2019 merupakan persaingan ulang Pilpres 2014. Pilpres 2019 dan 2014 mempunyai kemiripan dari segi rivalitas yaitu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasang capres-cawapres. Pasangan pertama adalah Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang diusung oleh sembilan partai dalam Koalisi Indonesia Kerja yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI. Pasangan kedua adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Gerindra, PKS, PAN, Berkarya.

Pengalaman kemenangan Pilkada DKI 2017 membuat kubu Prabowo menggunakan strategi politisasi agama dengan menggunakan konsultan dari Amerika, Roger Jason Stone yang memenangkan Donald Trump dengan menggunakan isu rasial (anti china) dan agama (anti-komunis) yang dikemas dalam ekonomi populis. Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Pada saat itu, Prabowo menunjukkan gelagat populisme bersifat ultra-nasionalis dan konfrontatif yang ingin mengembalikan Indonesia pada kejayaan masa lalu dalam pandangan negara korporatis, sedangkan Jokowi menampilkan populisme pragmatisme nir-ideologis dan teknokratis dengan tetap merujuk pandangan nasionalisme kerakyatan, dimana politik populis dikombinasikan antara pengalaman teknokrasi dan komunikasi langsung ke akar-rumput. populisme Jokowi cenderung memperlihatkan karakteristik yang berbeda dari populis di dunia pada umumnya. Visi politiknya tidak menawarkan

transformasi sistem politik dan status-quo secara radikal dengan menyerang eksistensi elit-elit politik yang berkuasa. Retorika anti-asing dan anti-elit cenderung diartikulasikan secara lunak dan implisit oleh Jokowi. Misalnya, ia menyoroti kedaulatan negara yang terancam oleh kesepakatan internasional, tidak maksimalnya penggunaan sumber daya alam bagi keadilan sosial dan kebaikan rakyat, serta kebergantungan besar pada hutang luar negeri oleh elit berkuasa sebelumnya (Defbry Margiansyah:2019).

Inilah yang menjadi tantangan Indonesia dalam mengembangkan demokrasi agar tercipta tujuan bangsa. Salah satu syarat mutlak demokrasi untuk mencapai tujuan bangsa menjadi bangsa yang mensejahterakan rakyatnya adalah pemilihan umum. Maka, dengan berbagai macam ujian demokrasi di Indonesia diperlukan tameng demokrasi. Disinilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu yang akan melahirkan para pemmpin-pemimpin bangsa memiliki punya tugas dan kewajiban yang berat dalam menjaga fitrah demokrasi dengan menyelenggarakan Pemilu tetap jujur dan adil.

1.5.2 Teori Masyarakat Madani

Konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban. Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara lain kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan yang mengikuti Undang-Undang dan bukan nafsu individu menjadikan ketergaduhan atau *predictability* serta ketulusan sistem.

Secara Definisi, Alexis de Toucquville (1969), menyebut *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: nilai-nilai individualisme, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*)⁵. Untuk lebih jelasnya masyarakat sipil adalah suatu ruang (*realm*) partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela (*vountary asociations*), media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering juga disebut organisasi massa di Indonesia

Didalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Eksistensi organisasi-organisasi inilah yang akan memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Karakteristik masyarakat madani antara lain

a. *Free Public Sphere*

Free Public Sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Warga negara berhak melakukan kegiatan

⁵ Budi Suryanti, Sosiologi Politik, Yogyakarta: IRCiSoD, 2007, hlm 148

secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik

b. Demokratis

Syarat ini menggambarkan masyarakat dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama

c. Toleran

Toleran menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu kehidupan yang berkualitas dan *tamaddun* (*civility*). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda

d. Pluralisme

Menurut Nur Cholis Majid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).

Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat dari Tuhan.

e. Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (negara)

Didalam masyarakat madani terdapat pilar-pilar penegak masyarakat madani yang merupakan institusi-institusi yang menjadi bagian dari *social control* yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat; adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan *empowering* (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program-program pemberdayaan masyarakat.

- b. Pers; memungkinkan untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya
- c. Supremasi hukum; memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan HAM, sehingga terpolakan bentuk kehidupan yang *civilized*.
- d. Perguruan Tinggi; sebagai pilar dari masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat.
Menurut Riswanda Immawan, perguruan tinggi memiliki 3 peran yang strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, yakni *pertama*, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar kehidupan yang demokratis. *Kedua*, membangun *political safety net*, yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara obyektif dan tidak manipulatif. *Ketiga*, melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati, demokratis serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan anarkhis.
- e. Partai Politik; merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warga negara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

Masyarakat madani memberikan gambaran masyarakat yang mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan struktur dan kondisi permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat adalah kurang aktifnya partisipasi warga masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk demokrasi dimana masyarakat memiliki kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapatnya. Individu maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam mendapatkan ruang berpendapat dan mempengaruhi kebijakan dalam suatu negara.

Dengan bertumbuhnya masyarakat madani, khususnya di Indonesia diharapkan akan berbondong-bondong membantu pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara yang mensejahterakan rakyatnya. Jangan sampai demokrasi yang telah jatuh bangun dibangun di Indonesia rusak karena acuhnya warga negara terhadap negaranya. Oleh karena itu, sebenarnya Indonesia merupakan laboratorium untuk mengembangkan masyarakat madani karena struktur masyarakat yang plural kita dilatih untuk toleran, demokratis, dan memberikan ruang sesama masyarakat. Sehingga, konflik-konflik horizontal tidak akan terjadi dan di dalam kontestasi Pemilu pun diharapkan tidak terdengar lagi saling serang identitas suku, agama, ras, suku dan golongan. Karakter ini akan sangat membantu semua elemen penyelenggara kontestasi politik, khususnya KPU dengan benar-benar melaksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil.

1.5.3 Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan Pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam Pemilu 2019 rakyat Indonesia memilih secara serentak DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Pimin Napitupulu, pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian, pemilihan umum adalah seni mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Sementara, Samuel Huntington berpendapat, Pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

Asas Pemilihan Umum :

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

a. Langsung, Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

c. Bebas, Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia, Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.

e. Jujur, dalam penyelenggaraan Pemilu seitap penyelenggara/pelaksana Pemilu, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil, Berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.5.4 Teori Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Selanjutnya Ramlan Subakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah⁶. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

⁶ Anam Rifai, Partai Politik, Demokrasi dan Kebijakan Publik, Malang: Program Sekolah Demokrasi, 2010, hlm 79

Selanjutnya, menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas' oed dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

- 1) Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- 2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial. Terjadinya perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa modern, ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki fungsi. Arbi Sanit memandang ada 3 fungsi partisipasi politik.

- 1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
- 2) Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah
- 3) Sebagai tantangan penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Kemudian, partisipasi politik sebaagai sebuah aktivitas, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam konteks Indonesia, Arbi Sanit menyebutkan 5 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia. *Pertama*, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang termasuk di bidang politik. *Kedua*, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. *Ketiga*, adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur. *Keempat*, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupaya kekayaan dalam masyarakat. *Kelima*, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Menurut Cholisin (2000), warga negara yang baik pada dasarnya tercermin dalam manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia pembangunan yang ber-Pancasila yang berkarakteristik sebagai berikut : (1) memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara, (2) memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, dan (3) partisipasi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, indikator warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara meliputi kemampuan: (1) ikut serta atau berpartisipasi dalam mewujudkan negara yang demokratis

(demokrasi politik), (2) berpartisipasi dalam mewujudkan kemanusiaan (demokrasi sosial), dan (3) berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial (demokrasi ekonomi).

Kegiatan partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Dalam Pemilu 2019 jumlah pemilih mencapai 192 juta. Dari jumlah tersebut berdasarkan keterangan dari Koordinator Pusat Peneliti Politik LIPI, Sarah Nuraini Siregar menyatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, ada sekitar 35 persen sampai 40 persen pemilih dalam Pemilu 2019 didominasi generasi milenial. Sedangkan, Dirjen Dukcapil menyebutkan, dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) jumlah pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa.

Secara legalitas hukum yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemilih pemula adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas. Kemudian, Rachmat dan Ester (2016) menyebutkan pemilih pemula

terdiri atas tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah.

Peningkatan pemilih muda dalam Pemilu 2019 merupakan kabar baik sekaligus merupakan tantangan bagi seluruh elemen penyelenggara Pemilu. Sudah kita ketahui bersama bahwa dalam Pemilu 2019 terdapat turbulensi politik identitas yang sangat kencang di samping adanya lonjakan pemilih pemula. Sedangkan, pemilih pemula ada di dalam pusaran antara antusiasme politik dengan apatisme politik. Kondisi ini ditambah dengan strategi politik yang digunakan dalam Pemilu dengan cara semburan fitnah yang dikenal sebagai strategi *Firehouse of Falsehood*.

Strategi *Firehouse of Falsehood* secara tidak langsung nampak dalam keberlangsungan Pemilu 2019 silam. Strategi tersebut selain menimbulkan kerawanan juga menimbulkan antusiasme partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Golose (2019) menyebutkan sejumlah kerawanan terkait Pemilu 2019 diantaranya: (1.) Pemilu ditumpangi agenda yang bertentangan dengan

Pancasila, (2.) praktik politik identitas dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dapat memecah belah masyarakat, dan (3.) kampanye negatif dan kampanye hitam. Pemilih pemula merupakan partisipan politik yang penting dalam Pemilu karena pengaruhnya di masa kini dan mendatang. Hal ini senada dengan pernyataan Rachmat dan Ester (2016) yang menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil dalam Pemilu dan perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang, hal ini karena kondisinya masih labil dan mudah dipengaruhi oleh kalangan-kalangan partai politik.

Pemilih pemula yang masuk kategori usia 17 tahun atau pun yang telah menikah memiliki beberapa karakteristik sebagai partisipan politik. Wardhani (2018) menyebutkan bahwa karakteristik dari pemilih pemula yaitu: (1) generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya, (2) sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya, (3) kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari *handphone*, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya, (4) mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, *twitter*, *facebook*, *linked in*, dan sebagainya, dan (5) mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Karakteristik partisipan pemula yang mudah dijangkau oleh para peserta Pemilu menjadi sasaran empuk untuk menambah

pundi-pundi suara atas keberhasilan dalam Pemilu. Beragam kejutan dan kuantitas suara menjadi sasaran utama karena tidak semua pemilih pemula memiliki pendidikan yang cukup untuk wawasan Pemilu. Hal ini membuat para peserta Pemilu dapat dengan mudah mempengaruhi pemilih pemula untuk memberikan suara.

Milbrath dalam Sastroatmodjo (1995) menyebutkan terdapat faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu yaitu: (1) Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik, (2) berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang yakni status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik, (3) menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup, dan (4) perbedaan regional merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu, sehingga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan strategi *Firehose of Falsehood* cukup berhasil diberlakukan dalam kegiatan Pemilu tahun 2019.

Dengan adanya lonjakan pemilih pemula tersebut maka partisipasi politik dalam Pemilu 2019 akan bertambah pula. Namun, di tengah adanya serangan politik identitas dengan menggunakan strategi *Firehose of Falsehood* menjadi tantangan tersendiri bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu. Pemilih pemula yang cenderung hitam putih dalam memaknai Pemilu harus bisa dikondisikan oleh KPU partisipasi politik tetap berjalan dengan baik. Dengan kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara Pemilu, khususnya KPU bertindak sebagai

wasit yang adil yang di setiap langkahnya didasarkan pada SOP yang baik dengan tetap menjunjung tinggi azas-azas Pemilu.

1.5.5 Teori Mobilisasi Masa

Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua aktor, yaitu individu dan Partai. Konsep aktivitas mobilisasi terdiri dari 3 proses: proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan.

Mobilisasi politik bukan sekedar sebagai proses dimana warga negara diarahkan pada keterlibatan politik. Definisi tersebut dianggap masih umum dan mungkin dilihat sebagai kelebihan ataupun kekurangan sebuah “pendapat umum” dari konsep-konsep di masa lalu mengenai terminologi “mobilisasi politik.” Bagaimanapun, pendefinisian secara umum ini bukan berarti bahwa konsep tersebut bisa digunakan untuk melihat konteks politik, semisal di China. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Verba, Schlozman & Brady (1995, 133) bahwa mobilisasi memiliki banyak makna. Mobilisasi dapat diartikan sedikitnya dalam tiga gejala sosial yang berbeda. Pertama, dalam aspek sosial ekonomi, sebagaimana didefinisikan dalam teori mobilisasi sosial tradisional, mobilisasi mengacu pada suatu proses “pertimbangan sosial dan pembangunan ekonomi”. Di dalam proses ini, besarnya “jumlah individu yang telah terurbanisasi sudah menjadi terpelajar, dan telah ditunjukkan pada pembagian peran dalam ekonomi”

(Almond & Powell, 1966, 284), dan pada “media komunikasi” (Almond, Powell & Mundt, 1996, 184). Kedua, Mobilisasi dapat berarti usaha pembersihan oleh rezim totaliter sebagaimana dilukiskan dalam “*Mobilization model*” yang dikatakan Barnett (1962, 31), sebagai gambaran yang terjadi pada rezim Maoist di China. Ketiga, “Mobilisasi” dapat juga mengacu pada proses selektif untuk melibatkan warga negara di dalam politik.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

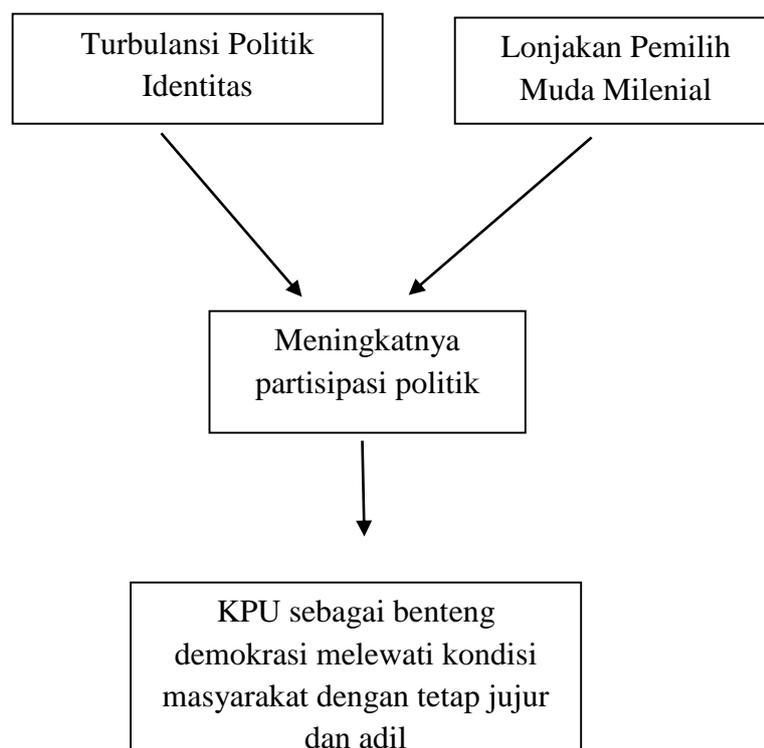
Pada Penelitian ini, penulis akan lebih berfokus kepada KPU dalam menghadapi kondisi masyarakat yang berbeda ketika Pemilu 2019. Masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2019 ini dihadapkan pada situasi yang panas. Politik identitas memanas serta pemilih pemula meningkat dengan tajam. Dikutip dari laman tirto.id bahwa dilihat dari sisi pembiayaan, mengeksploitasi identitas adalah cara lebih murah untuk memobilisasi pemilih. Namun, risikonya juga sangat tinggi. Politik identitas adalah politik pengelompokan (*grouping*) dan pembelahan (*dividing*). Ditambah dengan permainan politik dengan menggunakan strategi *Firehouse of Falsehood* yang menimbulkan bertebarnya fitnah di tengah-tengah masyarakat. Namun, walaupun risikonya sangat tinggi, cara ini ampuh untuk membuat para pemilih berbondong-bondong untuk datang ke TPS dan memilih peserta Pemilu sesuai dengan identitas yang sama dengan mereka.

Begitu juga dengan lonjakan pemilih pemula. Di lansir dalam nasional.kontan.co.id, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, pemilih muda memang lebih

dari 50% yang jika di kategorisasi hingga usia 35 tahun maka jumlahnya mencapai 79 juta, tetapi jika sampai 40 tahun maka jumlahnya mencapai 100 juta. Sedangkan khusus untuk pemilih yang pemula yang akan berusia 17 tahun per 1 januari 2018 sampai dengan 17 april 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa.

Dengan kondisi masyarakat yang seperti dijelaskan diatas, maka perlu respon dari penyelenggara Pemilu bahwa nantinya partisipasi politik akan tetap baik dan kondisi di tengah-tengah masyarakat tetap berjalan dengan kondusif pula. KPU sebagai badan penyelenggara Pemilu di Indonesia sudah seharusnya mengetahui kondisi masyarakat di tengah tubulansi politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial. Sehingga, apa yang dilakukan KPU merupakan respon positif untuk tetap bertujuan Pemilu yang baik dan kondusif, bukan hanya Pemilu 2019 saja tetapi juga Pemilu-Pemilu setelahnya. Sehingga, KPU tetap menjadi benteng demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur dan adil apapun tantangan kondisi masyarakat.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan Metode penelitian adalah metode yang digunakan mengolah data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan dan mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Metode penelitian di bagi menjadi dua yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan Berdasarkan buku John W. Creswell, disebutkan bahwa metode penelitian melibatkan berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya⁷. Metode penelitian juga dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan *mix-methods* (campuran kualitatif dan kuantitatif). Metode penelitian yang dilakukan penulis meliputi :

1.8.1 Desain Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan

⁷ John W. Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 332

serta melakukan analisis serta cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai serta menganalisis secara mendalam tentang peran KPU sebagai benteng demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil di tengah turbulansi politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial.

1.8.2 Subyek Penelitian

Dalam buku Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian⁸. Sejalan dengan definisi tersebut, subjek penelitian juga sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari KPU untuk menjelaskan bagaimana KPU selaku penyelenggara pemerintahan menghadapi kondisi masyarakat di tengah turbulansi politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial tetap melaksanakan pemilihan umum dengan jujur dan adil serta mengetahui faktor dan aktor peningkatan partisipasi politik pada Pemilu 2019. Oleh karena itu, penelitian tentang KPU dalam melewati turbulansi politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial mengambil subyek penelitian sebagai berikut :

1. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

⁸ Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm132

2. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3. Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi
4. Pengamat Politik
5. Koordinator Relawan NU Jawa Tengah
6. Kawal Pemilu

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini berupa teks, kata-kata tertulis frasa-frasa yang menggambarkan orang-orang, tindakan-tindakan angka dan peristiwa-peristiwa. Arikunto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Berdasarkan masalah penelitian data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengumpulan atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data wawancara, observasi dan foto dari Informan yang meliputi data relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, atau secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang diperoleh dari otoritas atau pihak yang berwenang dan mempunyai efisiensi yang tinggi.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan:

a. Observasi

Menurut Supardi (2006:88), “Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”⁹. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke KPU.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

⁹ Supardi, M.d, 2006. *Metodologi Penelitian*, Mataram : Yayasan Cerdas Press. Hlm 91

Wawancara Menurut Sugiono (2009:317) : Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi". Wawancara dibagi menjadi tiga kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam (*in Depth interview*). Berdasarkan strukturnya, penelitian kualitatif terdiri dari dua jenis wawancara yaitu wawancara tertutup dan terbuka. Pada wawancara tertutup pertanyaan di fokuskan pada topik-topik khusus atau umum dan pewawancara bekerja dengan dipandu oleh item-item yang dibuatnya. Sedangkan dalam wawancara terbuka peneliti memberikan kebebasan diri dan mendorongnya untuk berbicara secara luas dan mendalam, didalam menentukan isi wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (*In Depth Interview*) dan terbuka yaitu metode wawancara dengan bertemu langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang kompleks. Melalui wawancara mendalam tersebut akan dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian. Narasumber yang dipilih sesuai dengan subyek penelitian, yaitu Komisioner KPU RI, Peneliti Politik LIPI, Peneliti Politik Perludem, Pengamat Politik, Koordinator Relawan NU Jawa Tengah, dan Kawal Pemilu. Melalui wawancara mendalam

tersebut akan dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian. Dalam penelitian ini matriks yang dibutuhkan sebagai berikut

Tabel 1.1

Kelompok Informan dan Hasil yang Diharapkan

No	Kelompok Informan	Jumlah	Informasi Yang Dibutuhkan
1.	Komisioner KPU RI	2	Informasi mengenai cara KPU RI untuk menghadapi turbulensi politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial, politik yang panas, serta data-data mengenai pola sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat kepada KPU
2.	Peneliti LIPI	1	Informasi mengenai gambaran umum Pemilu 2019, karakter pemilih indonesia, peran sosial media dalam hiruk pikuk Pemilu, serta kinerja KPU dalam melewati turbulensi

			politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial
3.	Peneliti Perludem	1	Informasi mengenai gambaran umum Pemilu 2019, keterbukaan pemilih Indonesia, dan tren deklarasi pejabat publik kepada kandidat Pilpres 2019, serta memberikan evaluasi kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019
3.	Pengamat Politik (Koordinator Relawan NU Jawa Tengah)	1	Informasi mengenai gambaran umum Pemilu 2019, makna politik identitas, kinerja KPU RI selama Pemilu 2019, kegiatan yang dilakukan para relawan NU untuk Pemilu damai serta peran jejaring pesantren untuk partisipasi politik Pemilu 2019.
5.	Kawal Pemilu	1	Informasi mengenai peran masyarakat untuk mengawal Pemilu 2019 dan evaluasi

			untuk KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
--	--	--	--

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, arsip-arsip, media online dan sebagainya yang mendukung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan rumusan masalah dan mengenai KPU selaku penyelenggara pemilihan umum menghadapi kondisi masyarakat di tengah turbulensi politik identitas dan lonjakan pemilih muda milenial tetap melaksanakan pemilihan umum dengan jujur dan adil serta mengetahui faktor dan aktor peningkatan partisipasi politik pada Pemilu 2019. Dalam hal ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah catatan, transkrip, buku dan arsip-arsip dan informasi lewat media baik cetak maupun media online yang beredar.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara berikut:

a. *Recording*

Recording adalah proses merekam suatu suara, menyimpan semua data yang diperoleh di lapangan untuk mengetahui semua fakta yang ada yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. *Editing*

Editing adalah tahapan dalam memeriksa data-data yang telah diperoleh, pemeriksaan ini dilakukan jika terdapat kesalahan penulisan sehingga dapat diperiksa kembali.

c. *Presenting*

Presenting adalah tahapan menampilkan data-data yang telah diperoleh dan untuk memeriksa data untuk mempermudah dalam penyusunan dan penyajian data.

1.8.6 Analisis Interpretasi Data

Analisis data Patton merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berupa hasil wawancara terhadap beberapa subyek.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan dari wawancara maupun observasi di Kabupaten Banyuwangi. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dan sesuai dengan topik penelitian